



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRIHASTO SETYANTO
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 140702

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.920.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 334 m2/220 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 295 m2/104 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.570.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 602.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA 70 SEPEDA MOTOR Tahun 1977, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. MOBIL, TOYOTA HILUX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI NINJA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000
5. MOTOR, YAMAHA AIROX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. MOTOR, HARLEY DAVIDSON FATBOY Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
7. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 250.600.000

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.417.345.591



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.189.945.591
III. HUTANG	Rp.	1.561.672.600
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.628.272.991

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.